

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI SABTU
2 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



HARI INI, PENTASTIK FESTIVAL MUSIK #HITSMETAL SAMBANGI KOTA KETIGA SAMARINDA

MUDA
DINAMIS
AMANAH

ARIE
WIBOWO

CALEG DPRD KOTA SAMARINDA
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



HARI INI, PENTASTIK FESTIVAL MUSIK #HITSMETAL SAMBANGI KOTA KETIGA SAMARINDA

JAKARTA - PENTASTIK bisa dianggap sebagai festival musik yang akan memberikan warna segar dan pengalaman menarik dalam ranah pertunjukan musik tanah air.

Diprakarsai oleh promotor Visinesia Live, PENTASTIK siap menghadirkan pertunjukan seni musik pop "metal" (melayu total) menjadi budaya yang populer, seru, dan tak terlupakan bagi para penggemar musik tanah air.

"Pentastik bisa dianggap sebagai sebuah festival musik yang berbeda dari festival-festival pada umumnya. Festival ini mengangkat genre musik pop melayu yang menjadi budaya populer di skena musik Indonesia. Kami melibatkan sejumlah musisi besar dan bahkan dapat disebut legendaris di genre pop melayu dan dangdut untuk tampil dalam satu panggung festival. Dengan tema 'Hits Metal' (melayu total) yang kami usung, penonton

akan diajak bergoyang sepanjang pertunjukan!" beber Dipta, Director Visinesia Live.

Acara yang akan digelar di beberapa kota besar di Indonesia ini akan menyambangi para penggemar musik di Bandung, Makassar, Samarinda, Banjarbaru, dan kota-kota lain, dengan penutupan di Jakarta.

PENTASTIK telah memiliki line-up yang akan membuat para penikmat musik bergoyang massal. Beberapa di antaranya adalah Setia Band, Happy Asmara, Wali, Kangen Band, Repvblik, Mutia Ayu, dan masih banyak lagi nama-nama keren yang akan mengikuti dalam line-up PENTASTIK.

Pentastik kota pertama digelar pada bulan Juli di Bandung, dan diikuti oleh Makassar pada bulan Agustus, yang berhasil membuat ribuan penonton terhibur dengan bernyanyi dan bergoyang

bersama dalam penampilan Kangen Band, Wali, Setia Band, dan Mutia Ayu.

Untuk bisa menyaksikan PENTASTIK ini, pihak promotor telah menetapkan harga tiket mulai dari 100 ribu. Tiket sudah tersedia untuk dipesan melalui Goers.com, kiosTix, dan tiket.com.

"Kota ketiga akan digelar di GOR Kadrie Oening (GOR Sempaja) Samarinda. Ini sangat dinantikan para penggemar PENTASTIK karena ini akan menjadi momen sejarah dalam musik melayu," ucap Dipta.

Tiga band besar melayu, yaitu Wali, Repvblik, dan Setia Band, akan tampil dalam satu panggung, ditambah dengan penampilan Mutia Ayu dan juga bakat-bakat lokal dari Samarinda.

"Semuanya dengan penampilan yang berbeda dari festival musik lainnya," tutup Dipta. (rls)

Editor: Agus Susanto



Ketua DPD Demokrat Kaltim

IRWAN: DEMOKRAT KELUAR DARI KOALISI, TIDAK DUKUNG ANIES BASWEDAN

SAMARINDA - Partai Demokrat dengan tegas mengumumkan keputusan untuk meninggalkan Koalisi Perubahan Persatuan, sebagai respons atas keputusan Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi.

Wakil Sekretaris DPP Demokrat sekaligus Ketua Demokrat Kaltim, Irwan, mengumumkan keputusan ini pada Jumat (1/9/2023). Irwan menegaskan bahwa DPP Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan Persatuan dan akan mencari mitra koalisi yang baru, sambil menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan.

"Iya, Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan persatuan. Kami meninggalkan koalisi ini dan tidak akan mendukung Anies Baswedan, yang dianggap tidak jujur dan telah melanggar komitmen serta berkhianat terhadap apa yang telah dijanjikan," tegas Irwan.

Irwan menjelaskan bahwa nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

sebagai calon wakil presiden sudah disetujui oleh seluruh ketua umum partai yang ada di koalisi (NasDem, PKS, Demokrat). Bahkan pada tanggal 25 Agustus 2023, Anies mengirimkan surat persetujuan secara tertulis untuk mengusung AHY sebagai cawapresnya.

Namun, dalam kurun 5 hari kemudian, Anies melakukan pertemuan diam-diam dan mencapai kesepakatan untuk memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini disampaikan melalui utusan tengah malam kepada pihak Demokrat.

"Kami bersyukur bahwa keputusan ini terungkap lebih awal. Kita perlu pemimpin yang dapat dipercaya, yang memegang teguh komitmennya. Selama ini di dalam koalisi, kami tidak pernah memaksakan AHY sebagai cawapres. Malah, permintaan Anies yang akhirnya dia sendiri khianati," ungkap Irwan.

Irwan menekankan bahwa dalam pencarian mitra koalisi yang baru, Demokrat tidak akan tergesa-gesa. Mereka telah melakukan komunikasi dengan partai di luar

koalisi, seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

"Komunikasi dengan partai lain adalah hal yang wajar dan tidak dilarang. Demokrat telah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Pak Prabowo, dikunjungi oleh Pak Airlangga, Cak Imin, dan juga Mbak Puan," lanjutnya.

Irwan menjelaskan bahwa DPP Demokrat juga telah memberikan instruksi untuk menghentikan segala bentuk promosi terhadap Anies. Seluruh atribut yang berkaitan dengan Anies diminta untuk diturunkan. Yang pasti, Irwan menegaskan bahwa Demokrat, khususnya di Kaltim, akan memperkuat konsolidasi internal pasca keputusan Anies yang dinilai sebagai pengkhianatan.

"Yang pasti, saat ini kami berfokus pada mendukung semangat kader-kader yang merasa kecewa dan merasa dikhianati, sehingga setelah keluar dari koalisi, kami akan memperkuat konsolidasi internal," tutupnya.

Pewarta: Andi Deski
Editor: Agus Susanto



TIGA KESENIAN DARI KUKAR DITETAPKAN JADI BAGIAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA INDONESIA

SAMARINDA - Kesenian tradisional dari Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Jatung Utang, Mecaq Undat, dan Kuda Gepang, mendapatkan pengakuan tingkat nasional sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) pada tahun 2023.

Keputusan ini diambil dalam Sidang WBTBI yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 30 Agustus 2023, yang dipimpin oleh Tim Ahli Cagar Budaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Dalam upaya memperkenalkan dan melindungi kebudayaan asli Indonesia, Kementerian telah menganugerahkan status WBTBI pada beberapa kesenian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia.

Kukar, sebagai salah satu kabupaten di Kaltim, berhasil mengi-

rim lima perwakilannya, termasuk tiga maestro budaya dan dua perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.

"Kami sangat bersyukur karena ketiga kesenian dari Kukar, yaitu Jatung Utang, Mecaq Undat, dan Kuda Gepang, telah diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Ini adalah prestasi luar biasa untuk wilayah kami," Awang Rifani, seorang budayawan terkemuka dari Kukar.

Kesenian Jatung Utang adalah jenis musik tradisional Suku Dayak Kenyah, yang menggunakan alat musik kayu berbentuk gambar dan masuk dalam kategori alat musik Xilofon.

Sementara itu, Mecaq Undat adalah sebuah upacara adat yang dilaksanakan oleh Suku Dayak Kenyah untuk merayakan musim panen padi. Secara har-

fiah, Mecaq Undat berasal dari bahasa Dayak Kenyah yang berarti menumbuk beras sehingga menjadi tepung.

Selain itu, Kuda Gepang, yang merupakan bagian dari seni Kuda Lumping, adalah tarian yang dilakukan dengan menggunakan Eblek, anyaman bambu berbentuk hewan kuda, dalam sebuah barisan tarian yang memukau.

Pengakuan nasional ini menandai langkah penting dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia yang beragam.

Hal ini juga dapat membantu mendukung sektor pariwisata dan membawa perhatian lebih banyak orang kepada keindahan dan keunikannya.

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



WARGA SEPAKU CURHAT KEKHAWATIRAN PEMINDAHAN IKN KE POLDA KALTIM



Masyarakat Minta Pengisi Pj Bupati PPU Putra Daerah,
Dinilai Lebih Mengerti & Mampu Selesaikan Masalah



Kegiatan Jumat Curhat Polda Kaltim digelar di Balai Pertemuan Awa Bakat Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/9/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

WARGA SEPAKU CURHAT KEKHAWATIRAN PEMINDAHAN IKN KE POLDA KALTIM

PPU - Berbagai kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Sepaku atas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terungkap. Langsung di depan jajaran Polda Kaltim dalam sesi Jumat Curhat yang digelar di Desa Tengin Baru, Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (1/9/2023).

Disampaikan Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro, dalam proses pemindahan IKN mendengarkan aspirasi masyarakat PPU sangat dibutuhkan. Agar sinergitas masyarakat khususnya warga Kecamatan Sepaku dapat selalu menjaga keamanan dan Ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Banyak berita sentimen negatif dalam pemberitaan di awal IKN namun sebenarnya banyak dampak positifnya dari pembangunan IKN ini di Indonesia. Kami mengajak seluruhnya bersama-sama untuk menjaga kamtibmas," ujarnya.

Dalam sesi Jumat Curhat, seluruh petinggi Polda Kaltim, Polres PPU dan seluruh Polsek di PPU mendengarkan dan juga menerima masukan-masukan yang hadir. Termasuk para aparat Kecamatan Sepaku, desa-desa di Sepaku serta para tokoh masyarakat.

Salah satunya adalah Ketua LPM Desa Tengin Baru, Tasmah yang menyebutkan bahwa perpindahan IKN berdampak positif bagi wilayahnya. Yakni adanya peningkatan dari sisi perekonomian masyarakat.

"Namun sisi negatifnya banyak warga dari luar yang berdatangan yang mungkin belum terdata. Kami harap situasi bisa tetap aman dan kondusif," ucapnya.

Soal itu, Dirbinmas Polda Kaltim Kombes Pol Anggie Yulianto Putro

menanggapi dengan mendorong terbentuknya satuan keamanan lingkungan (satkamling) di masing-masing RT. Yang bertugas pokok menjaga kamtibmas.

"Kami sudah menyampaikan untuk perlunya tenaga pengamanan dalam menjaga lokasi perusahaan juga. Dengan ketentuan minimal Garda Pratama agar memiliki Kompetensi yang mumpuni," ungkapnya.

Selanjutnya, banyak kekhawatiran masyarakat yang berkaitan dengan urusan agraria. Seperti Ketua Rapi Kecamatan Sepaku Mauladin menyampaikan permasalahan pemutihan sertifikat bagi warga transmigrasi.

Di mana sejak tahun 1977 lahan yang digunakan sampai sekarang masih banyak permasalahan. "Seperti saat pembayaran ganti rugi yang berbeda. Kemudian dahulu banyak warga transmigrasi yang pergi kemudian kembali dan saat ini karena hadirnya IKN kembali mencari lahannya," ungkapnya.

Lalu juga Kasi Pemerintahan Kelurahan Sepaku menyampaikan adanya pembebasan lahan pembangunan Nasional yang harus dikawal hingga tuntas. "Kemudian banyak warga menanyakan bagaimana masuk kerja di IKN," sebutnya.

Selain itu juga, banyak ditanyakan terkait ganti-untung lahan di masing-masing desa. Termasuk adanya beberapa warga pemilik lahan yang telah lama meninggal dunia. Pun ada juga masalah pembebasan lahan yang masih terganjal aturan.

Untuk urusan berkaitan dengan itu, Roni Pontow yang mewakili Deputy Pengendalian Pembangunan Otorita IKN dalam tanggapannya mengatakan, land

freezing dilakukan untuk mengendalikan agar tidak terjadi sengketa lahan seperti di Jakarta. Di mana Saat ini ada sembilan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) telah ditetapkan oleh Otorita sesuai peruntukan wilayahnya. Land freezing adalah proses pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah.

"Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih tanah pada saat dilakukan pengadaan tanah pembangunan IKN," jelasnya.

Selain itu, hal tersebut dilakukan agar tidak ada mafia tanah yang memanfaatkan dan mempersulit proses pengadaan tanah sehingga dapat merugikan pemilik tanah. Begitu pula dengan proses perizinan, saat ini sudah dalam proses pembuatan aturannya, sehingga kedepan pengurusan izin dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik.

"Tahun depan otorita sudah mulai full bekerja. Dan apa yang sudah disampaikan masyarakat di sini akan menjadi bahan kami, di mana masyarakat sudah menunggu dan mendukung pembangunan IKN," ucapnya.

Lalu Bidang Sengketa Tanah Kanwil ATR BPN Kaltim, Muhammad Aidi menambahkan, rata-rata ada persoalan permasalahan lahan transmigrasi. Di mana legalitas dan fisiknya tidak sesuai lokasi.

"Persoalan lahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi harus diselesaikan bersama dengan para pemilik lahan. Untuk permasalahan lahan melibatkan para pihak masyarakat, bisa dilakukan mediasi, karena jika tidak ada yang mengalah maka tidak dapat kita selesaikan," pungkasnya.

Pewarta: Nur Robby Sya'i'a
Editor: Agus Susanto



Suasana pertemuan virtual antara Pemkab PPU dan Tim KPK RI, Kamis (1/9/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PPU TERPILIH JADI CALON LOKASI PENGANUGERAHAN DESA ANTIKORUPSI INDONESIA 2023

PPU - Penajam Paser Utara (PPU) telah terpilih sebagai salah satu calon lokasi untuk Penghargaan Desa Antikorupsi se-Indonesia tahun 2023. Seperti penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat negara yang baru, PPU dipilih karena letak geografisnya yang berada di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku juga telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Antikorupsi 2023. Desa yang akan masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ini berhasil memenuhi lima syarat yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dengan ditetapkannya Desa Tengin Baru, Provinsi Kalimantan Timur akan diwakili oleh desa ini sebagai desa antikorupsi setelah melalui seleksi ketat. Desa Tengin Baru bergabung dengan 81 desa dari 22 provinsi yang masuk dalam daftar nominasi desa anti ko-

rupsi se-Indonesia tahun ini.

Ketua Tim Penilaian Desa Antikorupsi KPK, Nurtjahyadi, mengungkapkan bahwa Desa Antikorupsi ini akan diluncurkan pada akhir November 2023 di Kantor Desa Tengin Baru. Penetapan PPU sebagai tuan rumah peluncuran ini telah melalui pertimbangan yang panjang, terutama berkaitan dengan unsur masyarakat dan budaya lokal. PPU dipilih karena posisinya yang dapat mengakomodir semua wilayah di Indonesia.

Nurtjahyadi menjelaskan, "Jika peluncuran dilakukan di Aceh, maka yang berada di Papua akan terlalu jauh. Begitu pula jika dilakukan di Maluku, maka yang berada di Aceh atau Sumatera Utara juga akan jauh. Akhirnya, dipilihlah lokasi yang dapat menjadi pilihan bagi semua." Provinsi-provinsi lain yang masuk dalam nominasi antara lain Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Program Desa Antikorupsi melalui empat tahap, yakni tahap observasi, tahap bimbingan teknis (Bimtek), tahap penilaian, dan tahap penghargaan. Dalam tahap observasi, desa-desa yang terpilih dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi indikator Desa Antikorupsi.

Sekcab PPU, Tohar, menyatakan bahwa Pemkab PPU siap mendukung peluncuran ini. Mereka akan mengkonsolidasikan rencana, mengidentifikasi lokasi dan persiapan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan ini.

Tohar menekankan akan berupaya mendukung sebaik mungkin inisiatif yang diambil oleh KPK dalam acara ini. "Kami berharap bahwa rencana kegiatan ini dapat berhasil untuk memfasilitasi peluncuran Desa Antikorupsi di Kabupaten PPU nantinya," pungkasnya.

Pewarta: Nur Robby Syai'an
Editor: Agus Susanto



Pelantikan Bupati PPU Hamdam pada 28 Desember 2022 silam. (Robbi/MediaKaltimGroup)

Masyarakat Minta Pengisi Pj Bupati PPU Putra Daerah, Dinilai Lebih Mengerti & Mampu Selesaikan Masalah

PPU - Harapan atas tokoh lokal mengisi posisi Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) terus disuarakan. Dinilai tidak hanya mengerti kondisi dan permasalahan daerah, juga untuk meminimalisir kekecewaan masyarakat.

Seperti diketahui, masa kepemimpinan Bupati PPU Hamdam Pongrewa bakal berakhir pada 18 September 2023, sebentar lagi. Dalam kekosongannya sebelum terpilih yang baru, hingga hasil Pemilu 2024, kursi pimpinan Pemkab PPU akan diisi oleh seorang Pj Bupati.

Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) PPU, Sahran mengharapkan bahwa Pj kepala daerah yang ditunjuk nantinya mampu membawa PPU ke arah yang lebih baik. Yang mana dalam penilaiannya, tokoh lokal mumpuni melakukannya.

Sebab, dirasa lebih memahami kondisi wilayah dan memudahkan dalam berkomunikasi. Maka

dari itu, ia menyarankan Pj itu nantinya berasal dari pejabat lokal di lingkup Pemkab PPU maupun Pemprov Kaltim.

"Jadi kalau ada apa-apa, Kita tidak canggung lagi berkomunikasi dengan beliau. Lebih mengerti daerah Kita lah," ungkapny, Jumat (1/9/2023).

Meski dalam penetapan nantinya berdasarkan mekanisme yang telah ada, namun aspirasi masyarakat setempat dapat turut menjadi pertimbangan. "Sistemnya sudah ada, tapi paling tidak didengarlah," tegasnya.

Sekadar informasi, dalam pengusulan Pj Bupati PPU, sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 4/2023, tentang Pejabat Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pasal 9 disebutkan Pj bupati dan walikota dilakukan oleh menteri, gubernur dan DPRD kabupaten/kota. Ketiganya dapat mengusulkan tiga nama-nama yang memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, harapan senada juga disampaikan masyarakat PPU, Muhammad Hatta. Ia mengatakan pengisian Pj kepala daerah nantinya diisi oleh pejabat lokal, sebab dianggap lebih mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat.

"Nah harapan Kita yang harus orang lokal yang tahu persoalan Kita di kabupaten. Kalau dari luar kan mohon maaf saja, mereka tidak tahu persoalan di masyarakat," sebutnya.

Satu contoh diungkapkan, permasalahan mengenai persoalan tanah di IKN, pendidikan dan kesehatan. Tentunya telah dipahami pejabat lokal, sehingga tidak lagi membutuhkan waktu penyesuaian.

Belum lagi, jika dalam penunjukan nantinya tidak sesuai dengan harapan, maka dinilai bakal ada gerakan dari warga. "Jangan salah, kalau memang bukan orang lokal dari Kaltim yang jadi Pj Bupati PPU, itu akan ada aksi," tutup Hatta. **(SBK)**



SOPAN SOPIAN DORONG PEMBANGUNAN & PENINGKATAN JALAN SERTA JEMBATAN DI MUARA MUNTAI



100 UNIT RTLH DI KUKAR RAMPUNG DIBANGUN



Kabid P3KP
Dinas Perkim
Kukar, Andi Mu-
hammad Yahya
(Rafi'i/Media
Kaltim)

100 UNIT RTLH DI KUKAR RAMPUNG DIBANGUN

TENGGARONG - Hingga akhir Agustus 2023, kemajuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kutai Kartanegara (Kukar) telah mencapai 100 unit dari total 231 unit yang termasuk dalam klaster 1. Klaster ini meliputi Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan.

Pembangunan RTLH di Kukar adalah hasil kolaborasi dengan Kodim 0906/Kukar dan dilakukan dengan metode swakelola bersama masyarakat setempat yang menjadi penerima manfaat. Pendekatan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sambil menyelesaikan klaster 1, pemerintah kabupaten saat ini sedang mempersiapkan pembangunan di kecamatan yang termasuk klaster 2. Pengadaan materialnya sudah masuk tahap pelaksanaan melalui aplikasi e-katalog. Begitu juga dengan wilayah kecamatan yang termasuk klaster 3. Pada tahun 2023 ini, targetnya adalah menyelesaikan sebanyak 1.010 unit RTLH, menggandakan angka dari tahun 2022 yang hanya menyelesaikan 512 unit RTLH.

"Kami berharap semuanya berjalan dengan lancar, dan ini adalah bagian dari program nasional. Sasarannya adalah mengurangi kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024," ungkap Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP), Dinas Perkim Kukar, Andi Muhammad Yahya.

Mengenai kendala yang dihadapi, Muhammad Yahya menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah dalam verifikasi dan validasi data masyarakat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Ditemukan bahwa beberapa orang yang terdaftar dalam DTKS dan P3KE telah mengalami peningkatan status ekonomi, sehingga diperlukan peninjauan ulang data mereka.

Sementara itu, dalam hal ketersediaan material, ia memastikan bahwa pasokannya cukup memadai, sehingga tugas Dinas Perkim Kukar lebih berfokus pada pendataan calon penerima manfaat.

Secara finansial, setiap rumah yang menjadi sasaran pembangunan akan menerima bantuan maksimal sebesar Rp 50 juta, yang akan dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan seperti atap, lantai, dan dinding. Dengan kata lain, jumlah bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah yang akan dibangun. Total anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp 50 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 40 miliar.

"Pembangunan RTLH ini melibatkan tentara dari Kodim 0906/Kukar, dan tidak menutup kemungkinan partisipasi masyarakat. Kami optimis bisa mencapai target tahun ini," tutup Muhammad Yahya. (adv)



Optimisme Tinggi Capai Target RTLH Kukar Tahun Ini

● Pembangunan RTLH di Kukar

- Total 100 unit RTLH telah selesai dibangun hingga Agustus 2023.
- Terdapat total 231 unit RTLH dalam klaster 1.
- Klaster 1 mencakup Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan.

● Metode Pembangunan RTLH

- Pembangunan RTLH di Kukar melibatkan Kodim 0906/Kukar.
- Penggunaan metode swakelola dengan partisipasi masyarakat penerima manfaat.

● Target Tahun 2023

- Target tahun ini adalah menyelesaikan 1.010 unit RTLH.
- Meningkatkan dua kali lipat dari 512 unit yang selesai dibangun pada tahun 2022.

● Sasaran Pengurangan Kemiskinan

- Program RTLH merupakan bagian dari program nasional.
- Sasarannya adalah mengurangi kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024.

● Anggaran

- Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 50 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 40 miliar.



Peningkatan jalan dan jembatan di Kecamatan Muara Muntai. (Istimewa)

SOPAN SOPIAN DORONG PEMBANGUNAN & PENINGKATAN JALAN SERTA JEMBATAN DI MUARA MUNTAI

TENGGARONG - Akhirnya, masyarakat dua RT di Desa Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar) dapat merasakan manfaat dari jalan yang mulus.

Perbaikan tersebut terjadi di RT 3 dan RT 5 setelah anggota DPRD Kukar Dapil 5, Sopan Sopian, berhasil mewujudkan aspirasinya berupa pembangunan badan jalan di wilayah tersebut.

Badan jalan sepanjang 200 meter ini ditingkatkan dengan peningkatan berupa semenisasi. Legislator yang berasal dari Partai Gerindra ini mengalokasikan anggaran pembangunan jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar.

"Iya, APBD Kukar tahun 2022 digunakan untuk mewujudkan

ini, berdasarkan usulan dari Musrenbang Desa Muara Muntai Ulu," ungkap Sopan pada Jumat (1/9/2023).

Sopan tidak hanya memfokuskan pada perbaikan badan jalan saja. Saat ini, ia juga berupaya untuk melakukan pelebaran dan semenisasi pada jembatan-jembatan di Desa Muara Muntai Ulu. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi mengalami gangguan saat menggunakan akses jalan, baik di jalan darat maupun jembatan.

"Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat saat ini bahan baku kayu ulin semakin sulit ditemukan. Kita harus mencari alternatif konstruksi baru untuk menggantikan kayu ulin, seperti semenisasi," lanjut Sopan. Saat ini, Sopan mengaku ma-

sih ada beberapa titik jalan lain yang menjadi target perbaikan. Namun, agar titik-titik tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan jalan dan jembatan, perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, terutama mengingat kenaikan signifikan dalam APBD Perubahan Kukar 2023.

"Semua desa di sana mengutamakan permintaan untuk meningkatkan, melebarkan, dan semenisasi jalan-jalan. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Muara Muntai, terutama dalam mengatasi masalah jembatan ulin yang mengganggu lingkungan," tutup Sopan. (adv)

Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Agus Susanto



SIAP BEROPERASI, BUS LISTRIK PUPUK KALTIM MEJENG DI PERESMIAN BRT BANDUNG RAYA



BACA HALAMAN A2



Kurangi Angka DBD, Begini Cara Kerja Implementasi Inovasi Wolbachia

BACA HALAMAN A8



Siap Beroperasi, Bus Listrik Pupuk Kaltim Mejang di Peresmian BRT Bandung Raya

KOMITMEN PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dalam mendorong dekarbonisasi dengan menekan penggunaan energi fosil di lingkungan perusahaan, secara bertahap terus dikembangkan dengan memulai peralihan kendaraan operasional dari sebelumnya menggunakan BBM menjadi moda transportasi listrik.

Setelah diawali motor listrik, komitmen Pupuk Kaltim berlanjut dengan memulai penggunaan mobil listrik untuk operasional perusahaan yang berjalan sejak Juni 2023. Hal ini merupakan tindak lanjut program net zero carbon emission yang dikembangkan Pupuk Kaltim, sejalan dengan prinsip Environment, Social and Governance (ESG).

Dalam waktu dekat, perusahaan pupuk terbesar di Asia Tenggara ini pun segera menambah unit transportasi

operasional menggunakan bus listrik, yang kini tengah dalam persiapan dengan jenis MD 8E Cross Medium Bus dari pabrikan Mobil Anak Bangsa (MAB).

Bus ini memiliki panjang 8 meter dan kapasitas baterai LiFePO 560,28V 228 Ah dan 127,74 KWh dengan transmisi AMT 4 kecepatan. Memiliki ukuran sedang, bus ini lebih fleksibel di jalanan menyesuaikan kondisi jalanan perkotaan maupun luar jalan protokol berukuran lebar. Selain itu, Pupuk Kaltim juga akan menambah unit bus listrik dengan panjang 12 meter.

Wajah unit transportasi ramah lingkungan itu pun turut dipamerkan pada rangkaian peresmian Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Kota Baru Parahyangan Bandung Barat beberapa waktu lalu.

VP Pelayanan Umum Pupuk Kaltim Wirza Eka Putra, mengungkapkan penggunaan bus listrik dalam mendukung aktivitas dan operasional perusahaan, merupakan kesinambungan komitmen Pupuk Kaltim mengedepankan prinsip ESG dengan berbagai peningkatan program setiap tahun.

Dikatakan Wirza, setelah motor dan mobil listrik, kini saatnya Pupuk Kaltim bergerak cepat untuk pengadaan bus listrik sebagai kendaraan operasional, agar daya tampung unit antar jemput di lingkungan perusahaan bisa mengakomodasi lebih banyak penumpang. Hal ini mengingat mobilitas di kawasan perusahaan yang cukup intensif, sehingga sarana pendukung dengan kapasitas yang jauh lebih besar perlu disiapkan untuk kelancaran aktivitas.

"Saat ini bus masih tahap uji coba dan



persiapan unit. Dalam waktu dekat baru akan dirilis dan dioperasikan sebagai tambahan sarana transportasi baru berbasis listrik di kawasan perusahaan," ucap Wirza, Kamis (31/8/2023).

Wirza menyebut Pupuk Kaltim secara bertahap akan terus memperbanyak kendaraan listrik guna menekan penggunaan bahan bakar fosil dalam operasional perusahaan. Kedepannya, langkah ini pun akan didukung penyediaan charging station berlisensi untuk pengisian daya seiring makin masifnya penggunaan.

"Pupuk Kaltim akan terus meningkatkan komitmen dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, sebagai langkah nyata penerapan ESG Perusahaan," tambah Wirza.

SVP SDM Pupuk Kaltim Ardi Harto Mulyo, mengatakan Pupuk Kaltim secara konsisten terus berfokus terhadap penerapan ESG di lingkungan perusahaan, guna mencapai target Net Zero Emission pada 2060 dan Nationally Determined Contribution (NDC) hingga 32 persen di tahun 2030. Penggunaan kendaraan listrik merupakan bagian dari komitmen tersebut, khususnya realisasi net zero carbon emission, guna menekan penggunaan energi fosil di lingkup bisnis Perusahaan.

"Dari hal itu, pertumbuhan usaha yang menitikberatkan pada keseimbangan kinerja sesuai prinsip ESG juga ditarget berjalan lebih maksimal dengan penggunaan kendaraan listrik secara bertahap," papar Ardi.

Langkah tersebut pun menilik prestasi Pupuk Kaltim yang berhasil menduduki peringkat tertinggi penerapan ESG dunia untuk kategori agrochemical, berdasarkan ESG Risk Rating Morningstar Sustainalytics tahun 2023.

Dimana serangkaian program dalam menekan emisi karbon dilaksanakan secara komprehensif dengan berbagai pengembangan, seperti green ammonia, pembangunan pabrik soda ash, community forest hingga pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Penggunaan mobil listrik juga upaya Pupuk Kaltim menjawab tantangan industri masa kini, dengan terus menggali inovasi untuk menerapkan praktik bisnis secara berkelanjutan. Sehingga manfaat tak hanya berdampak bagi pertumbuhan usaha, tapi juga menitikberatkan pada aspek keberlanjutan hingga kemandirian masyarakat sesuai kaidah ESG.

"Melalui kendaraan listrik, Pupuk Kaltim semakin meneguhkan posisi sebagai pionir transformasi industri hijau di Indonesia, dan inovasi ini akan terus ditingkatkan kedepannya," pungkas Ardi Harto Mulyo. (adv)



DPRD KOTA BONTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ilustrasi kawasan hutan lindung.

Status Lahan di RT 02 dan 03 Bonles Terus Berpolemik, Legislatif Desak Pemkot Segera Selesaikan

BONTANG – Status lahan di wilayah RT 02 dan 03 Kelurahan Bontang Lestari (Bonles) masih terus berpolemik. Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris pun meminta pemerintah daerah segera melakukan kajian untuk segera menyelesaikan masalah.

Polemik status kepemilikan lahan itu antara Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu dengan warga bernama Yuli yang mengaku pemilik lahan tersebut

"Kami minta pemerintah segera mempertegas seperti apa status lahan yang berada di tengah kawasan Hutan Lindung (HL) itu," ujarnya, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), beberapa waktu lalu.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, mengenai status lahan ini rentan terjadi polemik, lantaran pemerintah dinilai belum menata secara baik legalitas lahan yang dimiliki para petani-petani di lokasi tersebut.

"Melalui dinas terkait, harusnya pemerintah memberi arahan-arahan soal tata ruang lahan itu. Biar tidak ribut-ribut

antar masyarakat kelompok tani yang ada di sana," timpalnya.

Perwakilan Kelompok Tani Bangun Kutai Bersatu, Ashir Budiono mengaku, pihaknya telah menggarap lahan di areal tersebut sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2020 pihaknya secara resmi melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah.

"Setahu saya lahan yang kami garap itu tidak bisa diperjualbelikan, karena statusnya hutan lindung. Jadi pertanyaan kami apakah bisa status lahan hutan lindung itu dimiliki perorangan," tanya Ashir.

Sementara itu, Yuli mengklaim pembukaan lahan itu telah dilakukan sejak tahun 1982 dan kemudian di tahun 1987 lahan seluas 2,5 hektar tersebut ia beli. Di Tahun 2021 lahan tersebut sudah diperkuat dengan putusan pengadilan.

"Suratnya segel dan sudah ada semua putusan pengadilannya," terangnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang,

Ishak mengungkapkan, jika dihitung dari bibir jalan sekira 146 meter, maka sebagian besar lahan itu berpotensi masuk dalam kawasan hutan lindung. Namun ia belum bisa memastikan soal status lahan tersebut. Sebab, pihaknya belum melakukan kajian titik koordinat lahan secara langsung.

"Kalau sesuai data tahun 1982 kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung. Tapi akan kita kaji dulu titik koordinatnya untuk memastikan," terangnya.

Dipertegas oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan, Endang Mustinah, bahwa status wilayah Bontang Lestari masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL). Sesuai aturan yang berlaku, pengelolaan HL tidak boleh dilakukan secara perorangan.

"Sementara kelompok tani yang diperbolehkan adalah kelompok tani hutan, yang diregistrasi Dinas Kehutanan melalui KPHP sebagai petugas lapangan. Jadi bukan kelompok tani pada umumnya, tapi kelompok tani hutan," imbuhnya. (adv/al)



IST

Masalah gaji karyawan PT LBB kerap kali terjadi. Pemkot diminta bertindak tegas.

Gaji Karyawan PT LBB Kembali Nunggak, Andi Faiz Desak Pemkot Bertindak Tegas

BONTANG – Keterlambatan gaji karyawan PT Laut Bontang Bersinar (LBB) mendapat sorotan legislatif. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendesak Pemkot Bontang, agar segera menindak tegas LBB, lantaran kejadian ini bukan pertama kali terjadi.

"Kasihan karyawannya tidak ada kepastian dalam mendapatkan hak-haknya setiap bulan. Seperti gaji karyawan tidak dibayar, BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayar, dulu seperti ini juga dan terulang lagi," ujar Andi Faiz beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Andi Faiz, pendapa-

tan PT.LBB cukup besar jumlahnya sekitar Rp 500 juta. Baginya tak masuk akal jika perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawannya.

Pendapatan besar tapi tidak memiliki fasilitas penunjang kerja kantor, seperti laptop. Padahal jika LBB itu dikelola dengan baik, potensi pendapatan buat daerah disebut Andi Faiz sangat luar biasa jumlahnya.

"Hanya bermodal pulpen dan kertas saja sudah bisa mendapat cuan yang jelas. Sayang sekali kalau pengelolaan seperti ini trus dibiarkan. Kenapa tidak diganti saja ini PT. LBB, pemkot harus

tegas, kasihan karyawan-karyawan," tandasnya.

Diberitakan, PT LBB kembali menunggak gaji karyawannya. Sebanyak 23 karyawan PT LBB kembali mengeluhkan molornya pembayaran gaji di bulan Agustus ini.

Salah seorang pekerja yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa tunggakan itu bukan hanya gaji tetapi juga BPJS Ketenagakerjaan sejak Juli 2023.

"Seharusnya setiap tanggal 26 kita sudah gajian. Juli kemarin saja dipanjar dua kali," ujarnya belum lama ini. (adv/al)



Dukung Media Berkualitas, Badak LNG dan PWI Bontang Sukses Gelar Uji Kompetensi Wartawan

BONTANG - Badak LNG, sebagai bagian dari Subholding Upstream (SHU) Pertamina, bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bontang, telah sukses menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan tema "Pers Berkualitas, Pembaca Cerdas." Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 30-31 Agustus 2023, di Gedung Badak Learning Center Kompleks Badak LNG.

Sebanyak 19 wartawan dari berbagai daerah, termasuk Bontang, Kutai Timur, Samarinda, dan Balikpapan, turut serta dalam pelaksanaan UKW kali ini.

Mereka terbagi menjadi tiga belas wartawan untuk jenjang muda dan enam wartawan untuk jenjang utama. Dewan penguji yang hadir berasal dari Ketua PWI Kaltim dan Perwakilan PWI Pusat.

Tujuan dari penyelenggaraan UKW ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka.

Fathurrahman, Perwakilan PWI Pusat dan salah satu penguji, menekankan bahwa PWI telah berhasil mencetak ribuan wartawan yang kompeten.

"Hingga saat ini, PWI telah mencetak

17.874 wartawan yang kompeten, termasuk teman-teman yang berhasil lulus hari ini," jelasnya.

Selain itu, Yuli Gunawan, Senior Manager Corporate Communication & General Support Badak LNG, dalam sambutannya menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Badak LNG untuk mendukung pengembangan wartawan yang profesional dan berkompeten.

"Kami melihat ini sebagai tanggung jawab sosial kami, bagaimana perusahaan kami dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, termasuk para wartawan. Sehingga harapannya dari kegiatan ini, media-media di Kaltim, khususnya di Bontang, dapat menjadi media yang berkualitas dan kredibel," ungkap Yuli.

Badak LNG, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, telah memiliki pengalaman selama 48 tahun sebagai operator kilang LNG.

Selama ini, Badak LNG juga telah memberikan berbagai layanan teknis

dan pelatihan kepada berbagai kilang LNG di seluruh dunia.

Layanan yang mereka tawarkan antara lain Technical Services, yang merupakan layanan teknis untuk seluruh operasi yang berkaitan dengan engineering bagi perusahaan LNG. Kemudian, ada layanan pendampingan yang memastikan tahap pre-commissioning, commissioning, hingga start-up kilang berjalan dengan baik melalui program Commissioning & Start-Up Assistance (CSUA).

Tidak hanya itu, Badak LNG juga menyediakan Operations & Maintenance Services, yaitu jasa yang membantu perusahaan LNG dalam mengoperasikan kilang. Mereka juga memberikan pelatihan untuk menyiapkan dan mencetak tenaga ahli profesional di industri LNG.

Terakhir, Badak LNG menawarkan jasa penelitian dan pengembangan kepada perusahaan LNG untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan teknologi pemrosesan gas alam melalui program Research & Development. (rls)

Editor: Agus Susanto



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Konferensi pers pra launching implementasi inovasi Wolbachia untuk Kota Bontang.

Bontang Terpilih Pilot Project, Inovasi Wolbachia Bakal Dilaunching 5 September

BONTANG - Konferensi pers pra launching implementasi inovasi Wolbachia untuk Kota Bontang dilaksanakan sebagai persiapan launching Bontang Berwolbachia Serentak (Bawis) di Public Safety Center, Jumat (1/9/23).

Kegiatan ini merupakan inovasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, untuk mengurangi populasi nyamuk Aedes Aegypti di suatu daerah, sehingga angka kasus dan kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat berkurang.

Kemenkes dijadwalkan pada 5 September 2023 mendatang, akan me-launching Implementasi Inovasi Wolbachia di Kota Bontang, yang rencananya dilaksanakan di area parkir Bontang Kuala.

Bontang satu-satunya wilayah yang mewakili Kalimantan Timur menjadi Pilot Project Inovasi Wolbachia DBD. Hal ini sesuai dengan keputusan menteri kesehatan nomor 1341 tahun 2022 ten-

ang penyelenggaraan pilot project teknologi Wolbachia di 5 kota yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang dan Bontang.

"Alasan Bontang terpilih menjadi pilot project mewakili Kaltim, karena Bontang merupakan endemis DBD, jumlah kasus tinggi, adanya kasus kematian setiap tahun karena DBD, serta komitmen Pemkot Bontang dalam upaya pengendalian DBD," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Toetoeck Pribadi Ekowati.

Program ini dilaksanakan di seluruh kelurahan, yang rencananya akan terbagi dalam 2 tahapan. Tahap pertama 6 kelurahan, kemudian dilanjutkan 9 kelurahan. Ini yang membedakan implementasi wolbachia di kota lain yang terpilih.

Sebagai program nasional, pendanaan implementasi inovasi wolbachia di Kota Bontang berasal dari dana pemerintah pusat, APBD, serta sumber-sumber potensi lain di Kota Bontang di antaranya

adalah CSR.

"Hingga saat ini dana yang dikeluarkan dari anggaran murni dan perubahan kurang lebih hampir 1 miliar," jelasnya

Sementara itu epidemiolog ahli muda, Adi Permana menambahkan, nantinya akan disebar 4.911 titik di seluruh Bontang. Jumlah ini sudah diperhitungkan dengan radius 75x75 meter per kelurahannya.

"Ini kita letakkan di tempat yang ada pemukimannya saja, termasuk sekolah dan perkantoran. Kalau pabrik dan tempat kesehatan seperti rumah sakit itu tidak perlu," bebarnya.

Untuk daerah pesisir seperti Malahing dan Tihi-tihi juga akan diberikan. Untuk tahap awal ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, hingga Bulan Mei tahun 2024 mendatang. Sehingga akan membutuhkan 1.6 juta telur nyamuk untuk berkembang biaknya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Kurangi Angka DBD, Begini Cara Kerja Implementasi Inovasi Wolbachia

BONTANG – Dalam konferensi pers pra launching implementasi inovasi Wolbachia untuk Kota Bontang, Jumat (1/9/23) di Public Safety Center, dijabarkan bagaimana Wolbachia dapat bekerja untuk mengurangi Demam Berdarah Dengue (DBD).

Epidemiolog Ahli Muda, Adi Permana menjelaskan, Wolbachia adalah bakteri alami yang dapat ditemukan pada 70 persen spesies serangga, di antaranya lalat buah, lebah, kupu-kupu, dan lain-lain. Bakteri ini bukan bakteri baru, dan mungkin saja secara tidak sengaja kita sudah 'makan' bakteri ini.

Bakteri ini aman untuk manusia, sehingga manusia tidak mungkin terinfeksi. Hal ini sudah diriset Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan, yang telah melakukan analisis risiko melibatkan 24 ahli independen berbagai latar belakang keahlian dari berbagai institusi pendidikan ternama di Indonesia pada tahun 2016.

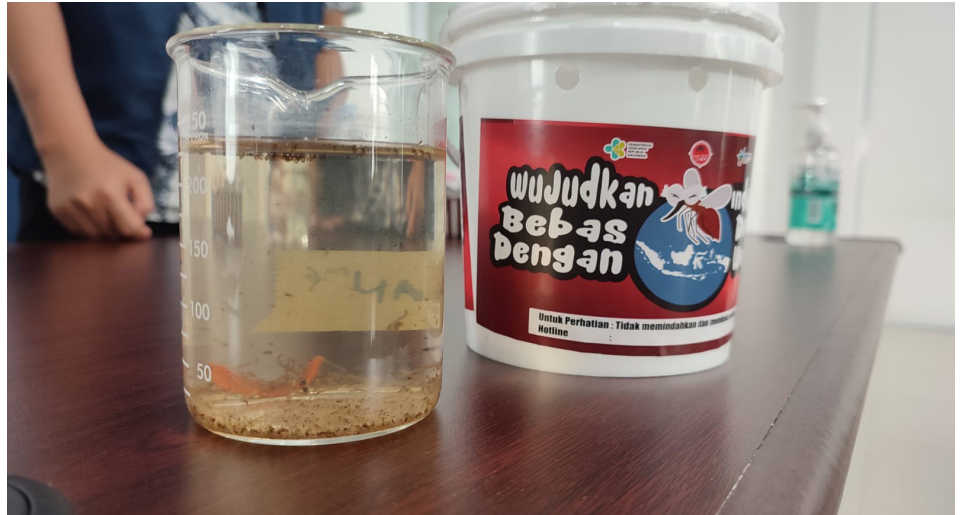
Wolbachia inangnya memang pada serangga, oleh sebab itu dalam tubuh manusia dia tidak bisa bertahan.

"Bakteri tersebut diekstraksi dan disuntikkan ke telur nyamuk. Pengerjaannya waktu itu dilakukan di salah satu universitas di Australia," jelasnya.

Kemudian mereka bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) Indonesia, dan berlanjutlah kegiatan tersebut di Indonesia. Setelah bakteri Wolbachia berhasil diinjeksikan ke telur nyamuk, maka selanjutnya secara turun temurun bakteri tersebut akan ada di nyamuk khususnya *Aedes Aegypti*.

Selanjutnya telur nyamuk *Aedes Aegypti* tadi dikirim dari Balai Besar Penelitian dan pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga ke Bontang. Telur berkembang biak secara alami menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk betina berwolbachia yang selanjutnya bisa disebut nyamuk baik, kawin dengan nyamuk jantan akan menghasilkan telur nyamuk berwolbachia.

"Nyamuk-nyamuk dewasa berwolbachia atau nyamuk baik itu nanti yang diharapkan terus berkembang biak. Diharapkan nantinya seluruh nyamuk



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Jentik nyamuk di dalam ember yang sudah dimasukkan Wolbachia

Aedes Aegypti di Bontang mengandung wolbachia," bebarnya.

Dalam pengembangbiakan tersebut nantinya, akan ada kader-kader yang ditunjuk oleh kelurahan untuk meletakkan ember yang diisi telur nyamuk *Aedes aegypti* yang berwolbachia. Kemudian tiap dua minggu sekali akan berkeliling mengganti air dalam ember tersebut, dan memastikan nyamuknya menetas. Karena nyamuk berwolbachia berumur pendek, sehingga setelah menetas dan terbang ia harus segera kawin dan menyebarkan bakteri Wolbachia tersebut.

Perlu dukungan dari seluruh pihak pemerintah, lintas sektor, perusahaan, dan utamanya masyarakat, untuk dapat menjadi lokasi atau penitipan ember-ember penetasan nyamuk berwolbachia tersebut.

"Sebelum launching beberapa tahapan kegiatan sudah dilakukan di antaranya sosialisasi tingkat kecamatan dan kelurahan, pre OJT Koordinator Lapangan (Korlap), dan OJT Sosialisasi Implementasi Tingkat Kecamatan," imbuhnya.

Setelah launching akan dilanjutkan dengan OJT korlap dan Kader, pemetaan lokasi penitipan ember nyamuk baik, dan rilis telur-telur nyamuk berwolbachia. Rilis tahap awal atau tahap I di 6 kelurahan dijadwalkan minggu ke-4 September 2023. Tahap selanjutnya akhir Desember 2023.

Prosesnya penyebaran dinilai cukup panjang, penyebaran nyamuknya kurang lebih 6 bulan, mengembangbiakan secara alami nyamuk baik atau nyamuk berwolbachia. Diharapkan dalam satu tahun ke depan jumlah populasi nyamuk baik atau nyamuk wolbachianya sudah mencapai 80% dari populasi nyamuk *Aedes aegypti* di Bontang.

Hasil implementasi inovasi wolbachia di Kota Jogjakarta dan Kabupaten Bantul selama periode 2017-2020 mampu menekan kasus demam berdarah hingga 77% dan menurunkan angka pasien dirawat hingga 86%.

Isnadhon Sokeh dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilker Bontang menjelaskan, akan ada identifikasi dari jentik atau nyamuk dewasa yang sudah menyebar di lingkungan Kota Bontang yang sudah diberikan ember jentik tersebut, tim tersebut nantinya akan memilah mana nyamuk yang *Aedes aegypti* dan bukan juga mana yang betina maupun jantan.

Nantinya nyamuk terpilih akan dikirim ke laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) di Banjarbaru untuk diperiksa.

"Nanti dengan pemeriksaan tersebut akan kita lihat apakah terdapat Wolbachia di dalamnya atau tidak, sehingga kita mengetahui efektivitas selama program ini berjalan," ujarnya

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



KOMITMEN TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, PT BERAU COAL GELAR SEMINAR GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN



**BAPENDA INGATKAN MASYARAKAT
BAYAR WAJIB PAJAK PBB-P2**



Kepala Bapenda Berau, Muhammad Said.

BAPENDA INGATKAN MASYARAKAT BAYAR WAJIB PAJAK PBB-P2

TANJUNG REDEB - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Muhammad Said mengingatkan kepada seluruh badan usaha atau perusahaan hingga masyarakat untuk patuh dalam membayar wajib pajak.

Pasalnya, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Berau mencapai Rp 15,193 miliar. Itu terhitung lima tahun sejak 2018 lalu.

Yang mana berasal dari badan usaha atau perusahaan 64,62 persen atau Rp 9,817 miliar dan pribadi atau masyarakat 35,38 persen atau Rp 5,375 miliar. Sementara, target serapan tahun ini yakni 85 persen atau Rp 5,500 miliar.

"Sampai semester I tahun 2023 ini baru terealisasi sebesar 30 persen," ungkapnya.

Dijelaskannya, penyebab tunggakan tersebut lantaran pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari Kantor Pajak Pratama Tarakan ke Pemerintah

Daerah tanpa penghapusan data. Sehingga tunggakan yang diterima banyak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kesadaran dan dukungan Aparat Kampung/RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 dan mengingatkan warganya untuk membayar PBB-P2 juga masih rendah," jelasnya, Jumat (1/9/2023).

Pihaknya akan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan baik langsung maupun melalui media untuk memberikan edukasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak.

Selain itu juga akan melakukan verifikasi dan validasi atas tunggakan PBB-P2 pada 13 kecamatan di Berau. Serta, melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Berau selaku pengacara negara untuk melakukan pendampingan dalam penagihan pajak.

"Yang tidak kalah penting juga

membuat Surat Edaran Bupati yang ditujukan kepada Kepala OPD dan Camat atau Lurah serta Kepala Kampung agar mempersyaratkan bukti lunas PBB-P2 Tahun berjalan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," terangnya.

Sejauh ini pihaknya telah melakkan berbagai upaya peningkatan pelayanan berupa pengelolaan PBB-P2 dengan meluncurkan aplikasi baru yaitu Sistem informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (SIP-PBB) dimana wajib pajak dapat diakses secara online. Termasuk melakukan pendaftaran dan mencetak SPPT PBB serta dapat melihat tunggakan PBB.

"Kami juga bekerjasama dengan Bank RKUD untuk membuka portal pembayaran guna memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online kapan dan dimanapun berada," tutupnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan



Foto bersama saat di sela acara seminar gerakan sekolah menyenangkan.

KOMITMEN TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, PT BERAU COAL GELAR SEMINAR GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN

TANJUNG REDEB - Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Batiwakkal, PT Berau Coal bersama Komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) mengadakan Seminar Gerakan Sekolah Menyenangkan.

Berlangsung meriah dengan tema Hadirkan Perubahan Baru dalam Pendidikan. Seminar ini dihadiri kurang lebih 500 peserta, termasuk para tamu undangan, kepala sekolah, serta perwakilan guru SD dan SMP dari 248 sekolah se-Kabupaten Berau, di Hotel Bumi Segah, Rabu (30/08) lalu.

Rangkaian kegiatan kemudian akan dilanjutkan dengan agenda workshop selama dua hari.

Bupati Berau, Sri Juniarsih dalam sambutannya membuka agenda ini, mengapresiasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT Berau Coal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui Seminar GSM.

Pemerintah Kabupaten Berau mendukung program peningkatan kualitas pendidikan seperti ini dan memberikan apresiasi

kepada PT Berau Coal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau atas penyelenggaraan seminar ini.

“Saya kira, Hal ini sejalan dengan visi dan misi kami, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. Kami menyadari, sektor pendidikan adalah sektor yang sangat krusial, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas,” paparnya.

Seminar ini diharapkan bisa menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Berau, sehingga mampu menghadirkan metode pengajaran yang berkualitas, efektif, dan menyenangkan bagi para tenaga pendidik dan peserta didik. Bupati Sri Juniarsih menggandeng seluruh pihak untuk bersinergi memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan pendidikan di Bumi Batiwakkal.

Cahyo Andrianto, General Manager Operational Support & Relations PT Berau Coal, menjelaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam program Pengem-

bangnan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Berau Coal. Melalui kerjasama dengan Gerakan Sekolah Menyenangkan, PT Berau Coal berkomitmen mendukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun serta meningkatkan partisipasi sekolah.

“Program ini awalnya kami mulai dengan menyasar sekolah-sekolah yang berada di lingkaran operasional PT Berau Coal, yang kemudian kami berharap dapat meluas hingga ke seluruh sekolah di Kabupaten Berau,” paparnya.

Sejak 2019, program GSM di beberapa sekolah yang berada di wilayah operasional PT Berau Coal telah menunjukkan perubahan positif. Program ini juga mencakup pelatihan guru, workshop, dan beberapa sekolah di Berau telah menerapkan GSM dengan dampak positif.

“Kegiatan GSM ini tidak hanya dilakukan di Berau Coal tapi juga telah dilakukan di lingkup grup Sinar Mas yang lain. Ini merupakan bentuk komitmen kepedulian Sinar Mas dan Berau

Coal dalam mendukung pemerintah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Berau pada khususnya,” terangnya.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh peserta dan tentu dapat menjadi modal untuk mengakselerasi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Berau. Ia juga berharap program ini bisa menghapus labelisasi bahwa menempuh pendidikan adalah suatu hal yang memberatkan.

“Kami harap inisiatif ini bisa menghapus label sekolah itu memberatkan. Sekaligus bisa meniadakan anggapan di kalangan pendidik bahwa mengajar anak semakin sukar. Tentu muaranya nanti kita harap bisa melahirkan SDM yang berkualitas dan handal,” jelasnya.

Muhammad Nur Rizal, Founder Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), mengapresiasi upaya

PT Berau Coal dalam meningkatkan kualitas SDM melalui seminar GSM ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, tenaga pendidik, dan masyarakat untuk kemajuan pendidikan.

Ia juga mengharapkan agar kegiatan ini dapat berjalan berkelanjutan dan peran PT Berau Coal dapat menjadi percontohan bagi perusahaan lain.

“Harapannya ini bisa diikuti perusahaan lainnya, perusahaan punya peran untuk membangun kualitas SDM. Sehingga nanti bisa berdampak lebih luas pada kualitas SDM yang ada di Berau,” pesannya.

Pelatihan bervariasi, tak hanya pelatihan administratif melainkan juga yang sifatnya kualitatif. Revolusi mental pengajar juga penting untuk diselaraskan, bagaimana guru bisa memberikan dampak positif kepada para murid yang dibangun melalui kreativitas. Sehingga bisa mun-

cul SDM yang tak hanya cerdas tetapi juga kritis.

Kepala Sekolah SDN 007 Tanjung Redeb, Rusmiati sebagai salah seorang guru yang pertama kali menerapkan GSM di Kabupaten Berau merasa bangga dan senang sekali dengan perubahan dampak positif yang terjadi di sekolahnya.

“Suasana di sekolah jadi lebih menyenangkan, para guru memberikan teladan dan afirmasi positif, siswa-siswa menjadi lebih bersemangat, tidak ketinggalan wali murid juga ikut terlibat dan merasakan perubahan positif pada anak-anaknya,” ungkap Rusmiati.

Ia kemudian menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada PT Berau Coal yang telah melakukan pendampingan program GSM sejak awal hingga saat ini komunitas GSM semakin berkembang dan menginspirasi banyak sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Berau. (adv)





WARGA TOLAK PENGAMBILAN LAHAN OLEH KODAM VI/MULAWARMAN



**PENGUKURAN LAHAN
BERUJUNG PENGANIAYAAN,
PELAKU DI BALIKPAPAN DITANGKAP**



Ketua DPC Demokrat Balikpapan, Denny Mapa

DPC DEMOKRAT TURUNKAN POSTER ANIES DI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Keputusan memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2024 oleh Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, telah menciptakan dinamika politik yang menarik, terutama di kalangan kader Partai Demokrat Balikpapan.

Saat Anies selama ini lebih dikenal dengan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, keputusannya untuk memilih Cak Imin dan berpisah dengan AHY telah menimbulkan perdebatan dan refleksi di tingkat daerah. Termasuk Kota Balikpapan.

DPC Demokrat Balikpapan memutuskan untuk menurunkan semua poster dan materi promosi yang berisi tulisan "Anies-AHY."

Ketua DPC Demokrat Balikpapan, Denny Mapa, dalam konfirmasi pada Jumat (1/8/2023), mengatakan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Kami telah memulai proses penghapusan ini sejak malam tadi seiring dengan keputusan yang telah diambil oleh anggota tim koalisi mengenai bakal

calon wakil presiden," ujarnya.

DPC Demokrat juga memberikan instruksi kepada seluruh kader, pengurus, dan bacaleg untuk menghentikan branding Anies sebagai Calon Presiden.

"Langkah ini kami lakukan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, dan sementara itu, semua materi yang dihapus akan digantikan dengan konten lain," tambah Denny Mapa.

Menurut Denny Mapa, kabar tentang perubahan sikap Anies yang sebelumnya mendukung AHY dan kini mendukung Cak Imin telah mengecewakan para kader. Terlebih pada tanggal 25 Agustus, Anies diketahui telah mengirimkan surat kepada AHY, memberi sinyal akan menjadi cawapresnya.

"Surat tersebut ada, keputusan ini diambil secara sepihak, kami merasa bahwa Nasdem dan Anies telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dengan mengadakan rapat internal tanpa mengundang anggota koalisi seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera," tutup Denny Mapa

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Komisioner KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry

MASA SANGGAHAN DCS DITUTUP, TAK ADA TANGGAPAN DITERIMA KPU BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah menutup masa sanggahan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang dimulai sejak Sabtu (19/8/2023) lalu hingga Senin (28/8/2023) pukul 23.59 WITA.

Komisioner KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry, mengatakan bahwa di Kota Balikpapan sejak awal pembukaan untuk memberikan tanggapan terhadap DCS hingga berakhir, tidak ada satu pun tanggapan yang masuk kepada mereka.

"Tidak ada tanggapan yang masuk kepada kami, baik melalui kanal di website maupun media lainnya, kami sudah memberikan kesempatan," ujarnya pada Jumat (1/9/2023).

Mega Fariany Ferry menjelaskan bahwa di Kota Balikpapan terdapat 650 DCS, terdiri dari 399 keterwakilan laki-laki dan 251 keterwakilan perempuan, yang berasal dari 17 partai yang tercatat di KPU Kota Balikpapan.

"Jika kemarin terdapat klarifikasi atau tanggapan terhadap DCS, saat ini kami meminta ke-

pada partai politik untuk melakukan klarifikasi," jelasnya.

Mengingat tidak ada tanggapan yang masuk, KPU Kota Balikpapan hanya akan menunggu pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 3 November mendatang.

Sebelum memasuki masa tanggapan DCS, yaitu tahap verifikasi administrasi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), terdapat 63 Bacaleg yang harus memperbaiki atau melengkapi persyaratan. Dalam masa itu, terdapat juga satu Bacaleg yang harus diganti oleh partainya.

Meski tidak disebutkan secara rinci, Mega menyatakan bahwa Caleg tersebut merupakan mantan narapidana yang masih belum memenuhi syarat.

"Untuk mantan narapidana, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi jika ingin mencalonkan diri, yang tercantum dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," tambahnya.

Dalam PKUPU tersebut, aturan untuk mantan narapidana tertera dalam pasal 11 poin (G), yang menyatakan bahwa seorang calon tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Sebagai tambahan, mantan narapidana yang mendaftar sebelumnya telah menjalani hukuman kurang dari lima tahun. Namun, yang penting adalah ancaman hukumannya, bukan masa hukumannya.

"Jadi, berhenti di verifikasi administrasi setelah perbaikan, dan kemudian langsung diganti oleh partai politik karena kami anggap tidak memenuhi syarat," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Warga Tolak Pengambilan Lahan oleh Kodam VI/Mulawarman

BALIKPAPAN - Puluhan masyarakat pemilik lahan dan ahli waris berkumpul di kawasan Kelurahan Sumberejo, Balikpapan Tengah, tepatnya di RT 41 dan 42 pada Jumat (1/9/2023).

Mereka berkumpul untuk menunjukkan kepada tim pengukur dari Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan bahwa lahan di RT 41 dan 41 adalah milik mereka dan bukan milik Kodam VI Mulawarman sebagaimana dalam persidangan yang saat ini tengah berlangsung di PN Balikpapan.

Pendamping hukum warga, Ardiansyah, mengatakan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan warga terhadap perampasan tanah yang dilakukan Kodam VI Mulawarman terhadap tanah warga dengan total luas 36 ribu meter persegi.

"Yang menggugat berjumlah 27 orang, pemilik asli sebagian sudah meninggal. Tapi ada ahli warisnya semua," ujarnya pada Jumat (1/9/2023).

Menurut Ardiansyah, lahan tersebut dulunya merupakan lahan perkebunan milik warga yang ditanami tumbuhan seperti kelapa sawit, elai, cempedak, nangka, dan lainnya. Namun, pada tahun 1980, tanah warga itu dirampas secara paksa oleh Laksus Pangkoptib dengan dalih pinjam pakai kepada Kepala Kampung pada masa itu, yaitu Salepo.

"Pinjam pakai itu cuma sepihak sama Kepala Kampung

untuk dijadikan tempat isolasi tahanan politik eks PKI saat itu," jelasnya.

Isolasi tersebut berjalan selama 2 tahun. Pada tahun 1983, tahanan eks tahanan politik PKI itu direlokasi ke Ambarawang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, tanah yang semula dijadikan perkebunan oleh warga itu tidak dikembalikan kepada masyarakat. Sebaliknya, Laksus saat itu malah menyulap lahan tersebut menjadi perumahan anggota TNI.

"Jaman dulu kan tidak ada yang berani menentang kekuasaan tentara, khususnya TNI AD. Sehingga warga saat itu hanya bisa pasrah," tambah Ardiansyah.

Kemudian pada tahun 1985, perumahan anggota TNI itu selesai dibangun. Tepat pada awal Januari 1985, sejumlah anggota TNI mulai menghuni perumahan tersebut.

Sebagian anggota TNI yang kini telah menjadi purnawirawan kemudian membeli lahan tersebut kepada pemilik lahan pada tahun 2003 dengan cara mencicil pembayaran tersebut hingga lunas.

"Purnawirawan TNI yang menempati lahan tersebut membeli lahan ini dari pemilik asli karena tahu lahan ini bukan milik Kodam," tegasnya.

Sejak awal Januari 2023, warga kemudian melayangkan gugatan ke pengadilan menyusul surat pengosongan rumah yang

dihuni para purnawirawan sejak tahun 2017 hingga Desember 2022. Warga juga memiliki sejumlah bukti kepemilikan atas tanah di kawasan Sumber Rejo ini, termasuk segel, sertifikat, dan akta jual beli.

Sementara itu, Kapendam VI Mulawarman, Kolonel Arm Kukuh Dwi Antono, mengklaim bahwa lahan Kodam VI Mulawarman di kawasan Sumber Rejo adalah milik Kodam dengan total luas 60 ribu meter persegi atau sekitar 6 hektar. Lahan tersebut tercatat sebagai barang milik negara dengan nomor kode KUAQ-PB/012.22.16.344293.000.KD.

"Nah, disini tercatat ada kurang lebih 121 bangunan," ujarnya.

Kukuh juga mengklaim bahwa Kodam VI Mulawarman memiliki legalitas yang sah atas kepemilikan lahan di Sumber Rejo tersebut dan akan mempertahankan tanah yang menjadi miliknya.

"Kita juga tidak berani jika itu bukan hak kita, bukan hak TNI AD, bukan hak Kodam. Kita juga tidak akan mempertahankannya," jelasnya.

Ardiansyah menambahkan bahwa agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari penggugat di Pengadilan Negeri Balikpapan. "Tanggal 7 nanti sidang selanjutnya," tutupnya. (Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



Kapolsek Balikpapan Timur, AKBP Puji Purwanto, saat menunjukkan pelaku HA beserta barang bukti parang yang digunakan untuk menganiaya korban.

PENGUKURAN LAHAN BERUJUNG PENGANIAYAAN, PELAKU DI BALIKPAPAN DITANGKAP

BALIKPAPAN- Pria berinisial HA (56) di Kota Balikpapan ditangkap polisi karena terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berat, yang terjadi pada Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 14.30 WITA.

Kejadian ini berawal di Jalan M Matroji RT 83 PJHI Dalam, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, ketika seorang saksi bernama Agus Rudiyanto sedang melakukan pengukuran lahan milik korban bernama Karsiyani (41).

Namun, ketika sedang melakukan pengukuran di batas antara lahan korban dan pelaku, Agus ditegur oleh pelaku karena telah memasuki lahan milik pelaku. Agus segera melaporkan insiden tersebut kepada korban. Korban pun datang ke lokasi untuk berbicara dengan pelaku.

"Kemudian terjadi perselisihan dalam pengukuran dan percecokan mulut antara korban dan pelaku," ujar Kapolsek Balikpapan Timur, AKBP Puji Purwanto, pada Jumat (1/9/2023).

Puji Purwanto menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam perselisihan tersebut, korban mengancam akan mempidanakan

pelaku. Akibatnya, pelaku emosi dan segera mengambil sebilah parang yang digantungkan dan mengayunkannya satu kali ke arah pelipis korban.

"Korban terjatuh, kemudian mencoba bangkit, tetapi pelaku kembali menyerangnya satu kali lagi, kali ini mengenai leher korban. Warga yang datang ke lokasi segera mengamankan keduanya," jelasnya.

Korban langsung dibawa ke Puskesmas Manggar oleh warga, sementara pelaku diserahkan kepada petugas Opsnal Polsek Balikpapan Timur yang datang ke tempat kejadian dan mengamankannya untuk proses hukum selanjutnya.

"Selain mengamankan pelaku, kami juga menyita sebilah parang yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban," tambah Kapolsek Balikpapan Timur.

Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat, dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun.

(Bom)

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto



INDEKS KUALITAS UDARA TETAP BAIK DI TENGAH KEBAKARAN HUTAN & LAHAN



**APKASINDO DITANTANG UNDANG INVESTOR
DIRIKAN PABRIK MINYAK GORENG DI PASER**



Lokasi sawah di Kabupaten Paser

PASER SIAPKAN 13.000 HEKTARE LAHAN CETAK SAWAH UNTUK DORONG KETAHANAN PANGAN DI IKN

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tengah mempersiapkan diri untuk ketahanan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terlebih Kabupaten Paser merupakan daerah yang berdampingan dengan IKN Nusantara.

Bupati Paser, Fahmi Fadli menyampaikan, Pemkab Paser bakal melakukan cetak sawah pada tahun 2024. "Rencana akan dilakukan cetak sawah di lahan seluas 9 sampai 13 ribu hektar, untuk kesiapan ketahanan pangan," terang Fahmi.

Meski demikian, tak menutup kemungkinan luasan lahan tersebut bakal bertambah jika usulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kaltim disetujui.

Pasalnya, beberapa lokasi yang juga potensi untuk peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Paser masuk dalam kawasan cagar alam. "Jika usulan itu bisa berhasil, maka kemungkinan perluasan ce-

tak sawah bisa bertambah," tambahnya.

Fahmi mengaku, berbicara soal ketahanan pangan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi melainkan dari semua sisi. Diungkapkan, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi mengenai ketahanan pangan.

"Seperti halnya kesiapan dari segi infrastruktur jalan maupun jembatan, hingga pada kesiapan lahan serta sumber daya manusia," ulasnya.

Ia berkomitmen akan mempersiapkan secara perlahan hal-hal yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan pangan di IKN Nusantara. Untuk diketahui, rencana tersebut juga selaras dengan RKPD Kabupaten Paser tahun 2023.

"Tentunya kita harus memikirkan kesiapan pangan kedepannya, saya sudah minta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Paser untuk meletakkan lahan pertanian kita di Paser," pungkasnya.

Pewarta: Bhakti Sihombin
Editor: Agus Susanto



APKASINDO DITANTANG UNDANG INVESTOR DIRIKAN PABRIK MINYAK GORENG DI PASER

PASER - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, meminta agar wadah bagi petani kelapa sawit dapat berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup petani menuju kesejahteraan.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) 2023-2028 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) Kabupaten Paser. "Dengan terbentuknya jajaran yang baru ini, kedepannya semakin berkembang," katanya.

Politisi PKB ini juga berharap bahwa APKASINDO dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, guna menjalankan Program Sawit Rakyat (PSR) atau yang biasa dikenal sebagai program replanting di Kabupaten Paser.

Kabupaten Paser telah dikenal sebagai salah satu wilayah dengan penerapan program terbaik di Indonesia. "Tentu saja ini merupakan pencapaian luar biasa atas kerja sama mereka, bersama pemerintah. Kami terus mendukung kelancaran program ini agar menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.

Tak hanya itu, dari segi pendapatan, ia menganggap pentingnya APKASINDO turut berkontribusi dalam mengundang investor dari luar untuk membangun pabrik minyak goreng, yang hingga kini belum ada di Kabupaten Paser.

"Kami berharap APKASINDO dapat menarik investor untuk membangun pabrik minyak goreng, yang selama ini menjadi harapan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW APKASINDO Kalimantan Timur, Betman Siahaan, mengungkapkan bahwa Kabupaten Paser merupakan daerah pertama yang mengajukan program PSR sejak tahun 2016. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, APKASINDO terus berupaya untuk mewujudkan program ini.

Siahaan juga berharap bahwa pengurus yang baru akan melanjutkan semua perjuangannya, termasuk dalam mengurus sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi setiap petani yang mengikuti program PSR.

"Jadi pembiayaan ISPO akan ditanggung langsung melalui program PSR," katanya.

Pewarta: Bhakti Sihombin
Editor: Agus Susanto



Penanggulangan Karhutla di Kabupaten Paser

INDEKS KUALITAS UDARA TETAP BAIK DI TENGAH KEBAKARAN HUTAN & LAHAN

PASER - Di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Paser, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser memastikan Indeks Kualitas Udara (IKU) masih relatif baik.

Hingga saat ini, kasus Karhutla yang terjadi sejak 30 Juli hingga 27 Agustus 2023, berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser tercatat sebanyak 29 kasus dengan luasan yang terbakar mencapai 140,3 hektare di 5 Kecamatan.

"Kondisi udara kita belum ada informasi dari DLH Provinsi Kaltim. Berarti kategorinya masih relatif baik," ungkap Kepala DLH Kabupaten Paser, Achmad Safari dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).

Dijelaskan Safari, pengujian kualitas udara menjadi agenda rutin DLH Kabupaten Paser. Biasanya dilakukan setiap semester tiap tahunnya. Data terbaru, sebelum musim kemarau panjang atau masa transisi, hasilnya relatif bagus.

Memasuki musim kemarau ini, biasanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan DLH Provinsi Kaltim memberikan peringatan atau informasi kepada DLH di setiap Kabupaten, termasuk Paser.

"Jika ada wilayah dengan kategori kondisi polusinya buruk. Tapi untuk wilayah Kaltim sampai hari ini belum ada," urai Safari.

Kabupaten Paser, kata Safari, memiliki alat pendeteksi kualitas

udara dengan metode passive sampler. Alat ini dipasang pada satu titik di suatu tempat selama 14 hari. Setelah itu diambil dan diuji di laboratorium.

"Pemasangan alat ini sudah dilakukan menjelang kemarau panjang atau masa transisi akhir Juni 2023," beber Safari.

Sejauh ini, tutur Safari, telah ada imbauan kepada pelaku usaha di daerah, baik perkebunan maupun pertambangan, untuk berhati-hati dan secara bersama-sama mengantisipasi kemarau.

"Kami sudah mengumpulkan para pelaku usaha untuk selalu siaga dan mengantisipasi terjadinya kebakaran," tutup Safari.

Pewarta: Bhakt
Editor: Agus Susanto